

**ANALISIS KINERJA BERBASIS VALUE FOR MONEY PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

SRI RAHMADHANI
NPM : 1802110122



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akutansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SRI RAHMADHANI
NPM : 1802110122

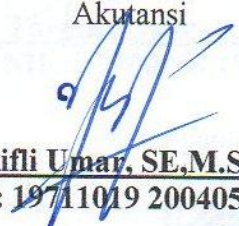
Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020**

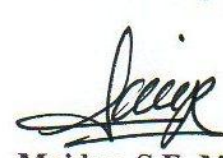
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

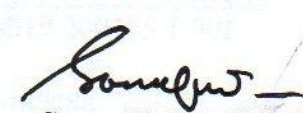
Ketua Program Studi
Akutansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK: 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Maidar, S.E., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Pembimbing II


Surya Fatma, S.E., M.Si
NIK.19651031 199406 2 001

Mengetahui,
Dekan,



Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, M.M
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akutansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SRI RAHMADHANI
NPM: 1802110122

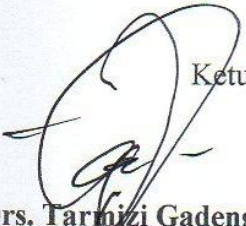
Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020**

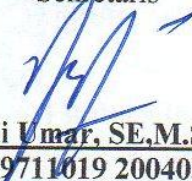
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 21 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

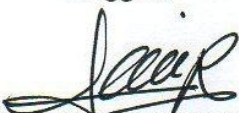
Ketua


Drs. Tarnizi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

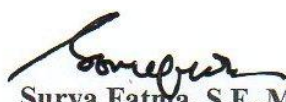
Sekretaris


H. Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK: 19711019 200405 1 001

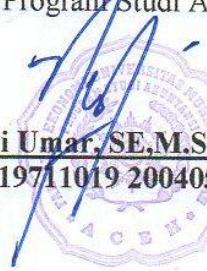
Anggota


Maidar, S.E., M. Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Anggota


Surya Fatma, S.E., M. Si
NIK. 19651031 199406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akutansi


Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. Ca
NIK: 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Maret 2022
Yang Menyatakan



Sri Rahmadhani
Sri Rahmadhani

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahmadhani
NPM : 1802110122
Program Studi : Akutansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH MEKANISME KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN UTANG DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SUBSEKTOR KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Sri Rahmadhani

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Berbasis *Value For Money* Pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya shalawat beserta salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang senantiasa berusaha memperbaiki akhlaq umat manusia menjadi insan yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan.

Meski tulisan ini telah dilakukan dengan maksimal, namun penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk membantu menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kemurahan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda alm Ishak Hasyim SossS, S,pd , Ibunda Marlina S,pd dan Abang Saiful Indi, Kakak Isna Yanti Amd. Keb, S.km, dan Adik Miftahul Jannah yang selalu memberikan do'a, dorongan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si,MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syamsidar, SE,M.Si,Ak. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ermad Mj, SE, M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan arahan, wawasan dan pengetahuan kepada penulis dengan tulus hati.

9. Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalankan kuliah hingga selesai.
10. Sahabat-sahabat penulis Mira, Zahra, Winda, Amal, Faris, dan Orang Special saya Rifal Vauzi yang telah banyak membantu penulis.
11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan, wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, bagi penulis khususnya dan umumnya bagi yang membaca skripsi ini.

Banda Aceh, 30 januari 2022

Sri Rahmadhani

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTARLAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 8
2.1 Konsep <i>Value For Money</i>	8
2.1.1 Pengertian Konsep <i>Value For Money</i>	8
2.2 Kinerja Keuangan	11
2.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan	14
2.2.2 Indikator <i>Value For Money</i>	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
2.4 Kerangka pemikiran	20
 BAB III. METODE PENELITIAN	 21
3.1 Desain Penelitian	21
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	21
3.1.2 Jenis Penelitian.....	21
3.1.3 Horizon Waktu	21
3.1.4 Unit Analisis.....	21
3.2 Jenis dan Sumber Data	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data	22
3.4 Teknik Analisis Data	22
3.5 Analisis <i>Value For Money</i>	25
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 26
4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.....	26
4.1.1 Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	26
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	26
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	26
4.2 Hasil Penelitian	30
4.3 Pembahasan	35
4.4 Analisis <i>Value For Money</i>	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Anggaran Yang Terealisasi Tahun 2018-2020.....	5
2.4 Penelitian Selanjutnya.....	18
3.1 Kriteria Rasio Ekonomi.....	23
3.2 Kriteria Rasio Efisiensi	24
3.3 Kriteria Rasio Efektivitas	24
4.1 Rasio Ekonomi Dinas Kesehatan Provinsi Banda Aceh.....	30
4.2 Rasio Efisiensi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.....	32
4.3 Rasio Efektivitas Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.....	34
4.4 Rasio Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2018.....	44
1.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2019.....	45
1.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2020.....	47

ANALISIS KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020

SRI RAHMADHANI
NPM : 1802110122

Pembimbing :1) Maidar, SE,M.Si
2) Surya Fatma, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja berbasis *value for money* pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomis pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tahun 2018 dan 2020 tergolong ekonomis akan tetapi pada tahun 2019 tidak ekonomis, tingkat efektivitas pada dinas Kesehatan Provinsi Aceh tahun 2018-2020 tergolong sangat efektivitas dimana persentasenya berada di atas 90%-100%, tingkat efisiensi pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh pada Tahun 2018-2020 tergolong tidak efisien dikarenakan persentasenya di atas 90%-100%. Hendaknya Dinas Kesehatan Provinsi Aceh melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dari segi ekonomis dapat mempertahankan kinerjanya dari tahun ke tahun berikutnya.

**Kata kunci : Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas *Value For Money* Dinas
Kesehatan Provinsi Aceh.**

**ANALISIS KINERJA BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2020**

SRI RAHMADHANI
NPM : 1802110122

Pembimbing :1) Maidar, SE,M.Si
2) Surya Fatma, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine to performance based on *value for money* at the Provincial Heath Office Aceh. In this study using quantitative descriptive approach with data collection techniques, namely documentation. The data use is secundar data the form of financial statements of the budget and expenditures of the Aceh Provincial Health Office. The results showed that, the economic ratio at the Aceh Healt Office in 2018 and 2020 wa classified as economic but in 2019 it was not economical. The effectiveness at the Aceh Health Office in 2018-2020 was very efficient where the percentage was above 90%-100%. The efficiency at the Aceh Health in 2018-2020 is classified as inefficient because the percentage is above 90%-100%.. The Aceh Provincial Healt Office should save the operational costs incurred. So that the performance of the Aceh Provincial Health Office from an economic point of vie ca maintain is performance from year to year.

**Kata kunci : Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas *Value For Money* Dinas
Kesehatan Provinsi Aceh.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang *inefisiensi*, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan UU No.25 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik pelaksanaan *good governance* yang diberikan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2016:97), meliputi partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi kepentingan umum (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi ke depan (*strategic vision*). Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan

konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2016:9).

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, direncanakan akan dilaksanakan organisasi publik.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting pada suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2016:98).

Value For Money menurut Mardiasmo (2016:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi

sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian manajemen strategis. Hal ini penting karena pengukuran kinerja merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen strategis. Dengan memahami siklus manajemen strategis tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja merupakan tahapan yang sangat vital bagi keberhasilan implementasi manajemen strategis. Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian organisasi. Implementasi rencana strategis akan dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh pola pengukuran kinerja yang berada dalam koridor manajemen strategis.

Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik (Mahmudi, 2016:7). Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh mencakup aspek yang bersifat *tangible* maupun *intangible* maka metode pengukuran kinerja harus didesain sedemikian rupa agar bisa representatif selain juga *applicable*. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Balance Score Card* dan metode *Value for Money*. Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*), sedangkan dengan metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berarti memperoleh *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.

Efisien berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil

guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Dari ketiga elemen pokok *Value for Money* tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup (Mardiasmo, 2016:4). Dengan memperhatikan kinerja Dinas Kesehatan yang kian menjadi sorotan dan juga permasalahan, tentunya karena pengelolaan keuangan diantaranya adalah realisasi. Adapun data anggaran dan realisasi anggaran belanja pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi Tahun 2018-2020

No	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Tahun 2018 Belanja Langsung Jumlah Belanja Tahun 2018	1.107.964.689.893 1.151.050.258.612	1.000.815.821.373 1.041.035.037.101
2	Tahun 2019 Belanja Langsung Jumlah Belanja Tahun 2019	982.082.183.309 1.02.048.085.096.	931.898.848.122 977.019.061.439
3	Tahun 2020 Belanja Langsung Jumlah Belanja Tahun 2020	1.141.190.703.622 1.189.706.141.947	1.049.310.542.506 1.091.003.542.506

Sumber: LRA Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tahun (2018-2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa beberapa jenis belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh selama tahun anggaran 2018-2020 mengalami fluktuasi dimana, tahun 2018 jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp1.151.050.258.612 dan jumlah yang terealisasi sebesar Rp1.041.035.037.101. Pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp1.02.048.085.096 dan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp977.019.061.439, terjadinya penurunan anggaran dikarenakan pada salah satu program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dimana jumlah dana yang terealisasi lebih besar dari jumlah anggaran yang diberikan. Kemudian pada tahun

terakhir tahun 2020 mengalami kenaikan anggaran kembali sebesar Rp1.189.706.141.947 dan jumlah yang terealisasi sebesar Rp1.091.003.542.506. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Berbasis *Value For Money* Pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja berbasis *value for money* pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja berbasis *value for money* Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua elemen yang membutuhkan dan dijadikan masukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis, terdapat beberapa manfaat hasil penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

- a. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis berbasis *value for money*.
- b. Manfaat bagi penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai analisis kinerja berbasis *value for money* pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep *Value for Money*

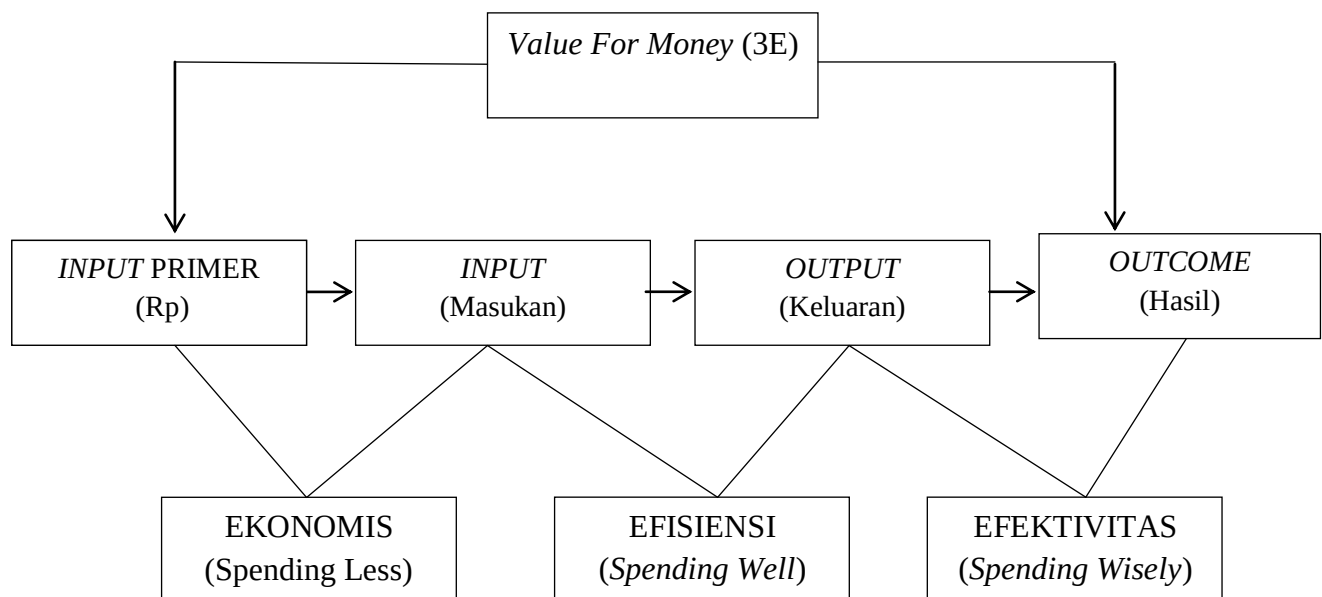
2.1.1 Pengertian konsep *Value for Money*

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*). Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur *output*, karena *output* yang dihasilkan tidak selalu berupa *output* yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output* (Halim, 2017:125).

Menurut Mahmudi (2016:83), menyatakan bahwa *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan (Dwi, 2019:145)

Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil

yang maksimal, serta efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran. *Value for Money* merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari *input*, *output*, dan *outcome*. Kegagalan organisasi sektor publik untuk mendapatkan *input* dari pada harga yang semestinya menyebabkan tidak terpenuhinya indikator ekonomis. Selanjutnya, *input* yang terlalu mahal akan mengakibatkan efisiensi yang pada akhirnya akan mengarah pada ketidak efektifnya pencapaian program secara keseluruhan (Halim, 2017:135) skema *value for money* adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Mahmudi (2016:6)

Gambar 2.1 *Value for Money* Secara Skema

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan

efektivitas (Mahmudi, 2016:83), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomis: konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar.
2. Efisiensi: efisien terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau istilah lain *output* per unit *input*.
3. Efektivitas: efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan

Sedangkan untuk indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian

(Mardiasmo, 2016:130), yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas artinya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*).

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik (Renyowijoyo, 2013:5), antara lain:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

2.2 Kinerja Keuangan

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Menurut Bastian (2014:274), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Biasanya orang yang kinerjanya tinggi disebut sebagai orang yang produktif, tetapi sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau berkinerja rendah.

Menurut Mahsun (2014:98) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Jumingan (2017:239) kinerja keuangan adalah penjelasan kondisi keuangan perusahaan pada

suatu periode tertentu terkait berbagai aspek seperti penghimpunan dan penyaluran dana.

Kinerja merupakan sebuah usaha yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu, Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan tugasnya dengan menggunakan aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan Buletin Teknis SAP. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP 71 Tahun 2010).

Kinerja merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila

perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015:164).

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “*performing measurement*“, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2010:69).

Penilaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja dari karyawan dimana kegiatan ini perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar bisa mengevaluasi kinerja dan meningkatkan produktivitas karyawan. Menurut Dessler (2017:98) Penilaian kinerja (*performance appraisal*) berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Pada intinya, penilaian kinerja selalu melibatkan proses penilaian kinerja (*performance appraisal process*) tiga langkah: (1) menetapkan standar kerja; (2) menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar (ini biasanya melibatkan beberapa formulir penilaian); dan (3) memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas standar.

Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan maka secara umum perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, yang menurut Brigham dan Houston (2016:78) mencakup (1) perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan (2) evaluasi kecenderungan posisi

keuangan perusahaan sepanjang waktu. Laporan keuangan perusahaan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Simanjuntak dalam Widodo (2015:34) Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Dalam rangka mewujudkan kinerja keuangan pemerintahan yang optimal, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Adisasmita (2014:36), banyak factor yang mempengaruhi kinerja organisasi, antara lain:

- a. Sumber daya manusia, merupakan faktor terpenting dikarenakan manusia adalah yang melaksanakan pekerjaan dan menentukan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
- b. Sumber dana dan pembiayaan (anggaran) karena kegiatan apapun baik operasional maupun non operasional tidak akan terlaksanakan dengan baik apabila tidak tersedia biaya ataupun anggaran yang cukup memadai. Faktor anggaran juga merupakan *input* yang menentukan bagi terwujudnya kegiatan-kegiatan untuk mencapai *output* atau hasil yang kongkrit.
- c. Sarana dan prasarana, karena digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah. Sarana dan prasarana

merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik. Jika manusia sebagai pengendali anggaran sebagai penggerak, maka sarana dan prasarana adalah sebagai kendaraanya atau alat yang digunakan agar sampai ketujuan dengan mudah dan efisien.

- d. Waktu yang digunakan, yaitu ketepatan dan kecukupan waktu yang disediakan dalam melaksanakan tugas. Ketepatan waktu yang dimaksudkan adalah baik saat pelaksanaan maupun saat pelaporan, sedangkan kecukupan waktu yang dimaksud adalah ketersediaan waktu dalam persiapan atau pelaksanaan.

2.2.2 Indikator *Value For Money*

Muhmudi (2019: 60) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur tingkat 3E, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Jika suatu aktivitas tidak memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ahli pengukuran kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, visi dan misi, baik deskripsi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dari seorang atau kelompok untuk ekonomis dan efisiensi serta efektivitas perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sulastiningsih (2015) dengan judul “Pengukuran Kinerja Berbasis *value For Money* Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara” penelitian ini bertujuan untuk

menilai kinerja keuangan SMP Negeri 2 Banjarnegara dengan menggunakan metode *Value For Money*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis. (2) Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. (3) Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) dengan judul penelitian “Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Kecuali pada tahun 2011. Rasio efektifitas tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwakinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%.

Sari (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010-2013, menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada

tahun 2010 tidak efektif namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengukuran Kinerja Berbasis <i>value For Money</i> Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara” penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan SMP Negeri 2 Banjarnegara Sulastiningsih (2015)	Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan tabel kriteria ekonomis kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis. (2) Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. (3) Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif.	Konsep Value For Money	- Tempat Penelitian - Waktu penelitian - Jumlah sampel
2	penelitian “Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir Putra (2014)	Kuantitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Kecuali pada tahun 2011. Rasio efektifitas tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara tidak efektif karena hasil rasionya kurang	Konsep Value For Money	- Tempat Penelitian - Waktu penelitian - Jumlah sampel

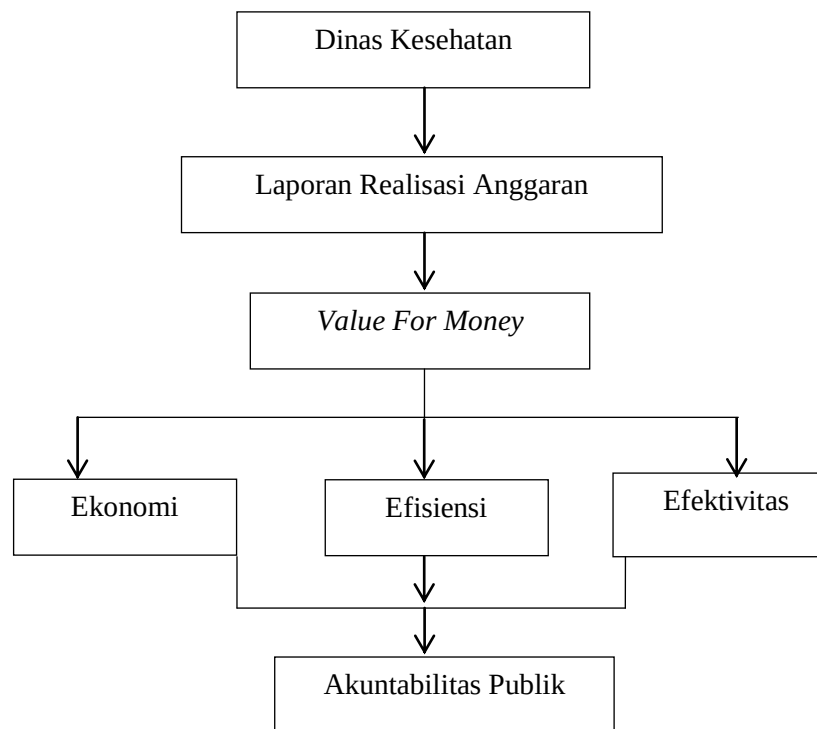
2.1 Tabel Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pada bagian SIM secara umum tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%		
3	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip <i>Value For Money</i> (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013) Sari (2014)	Kuantitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010- 2013, menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif.	• Konsep <i>Value For Money</i>	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian • Jumlah sampel

Sumber data: Data diolah, 2021

2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang sistematis yang dilakukan melalui langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti maka dibutuhkan data-data yang akurat dan *up to date*. Penelitian ini pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang berlokasi di Jl. Tgk. Syech Mudawali No. 6, Kampung Baru, Baiturrahman, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, pada tahun 2018-2020

3.1.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif*, pendekatan *kuantitatif* adalah penelitian lebih menekankan pada angka. Metode *Kuantitatif* dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian (Sugiyono, 2017)

3.1.3 Horison Waktu

Penelitian inidirencanakan pada bulan September 2021 s/d selesai di pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aspek-aspek yang terdiri dari aspek ekonomis,efesiensi,efektivitas.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah suatu sumber data penelitian yang dapat di peroleh secara langsung dari sumber asli, turun kelapangan secara langsung, (Indriantoro dan Supomo: 2013). Untuk data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pada Dinas KesehatanProvinsi Aceh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan laporan realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan (Mardiasmo:2016) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar (Dwi, 2019:194). Ekonomis merupakan perbandingan *input value* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Rasio\ Ekonomis = \frac{Input}{Input\ Value} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Dana realisasi yang digunakan (Realisasi Anggaran Belanja)

Input Value : Dana anggaran yang dianggarkan (Target Anggaran Belanja)

Berdasarkan hasil rasio ekonomis maka, kriteria rasio ekonomi adalah:

- Jika presentase rasio yang diperoleh nilai kurang dari 100% ($\leq 100\%$) maka dikatakan ekonomis.
- Jika presentase rasio yang diperoleh nilai sama dengan 100% ($= 100\%$) maka dapat dikatakan ekonomis seimbang.
- Jika presentase rasio yang diperoleh nilai lebih dari 100% ($\geq 100\%$) maka dapat dikatakan tidak ekonomis.

Tabel 3.1
Kriteria Rasio Ekonomis

Persentase	Penilaian
$\leq 100\%$	Ekonomis
$= 100\%$	Seimbang
$\geq 10\%$	Tidak Ekonomis

2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi (Indra Bastian 2014:280). Mardiasmo (2016:133) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan

Output : Realisasi Anggaran Belanja

Input : Target Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklarifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase	Penilaian
90% – 100%	Tidak Efisien
80% – 90%	Kurang Efisien
70% – 80%	Efisien
60% – 70%	Cukup Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Metode penelitian kuantitatif (Mardiasmo, 2016:133)

Apabila hasil perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran mencapai kurang dari 60%, maka anggaran dapat dikatakan sangat efisien dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran di atas 100% maka anggaran dapat dikatakan tidak efisien. Dengan kata lain semakin rendah tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efisien, begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2016:134). Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Realisasi Anggaran Belanja

Output : Target Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut

Tabel 3.3
Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase	Penilaian
90% – 100%	Sangat Efektif
80% – 90%	Efektif
70% – 80%	Cukup Efektif
60% – 70%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

3.5 Analisis *Value For Money*

Value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value for money* yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

4.1.1 Sejarah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh

Instansi Kesehatan (IKES) daerah Aceh terdiri pada tahun 1959 bertempat di basecamp tentara jepang Blang Padang, namun pada tahun 1977 bangunan IKES Daerah Istimewa Aceh yang telah dibangun roboh, kemudian pada tahun 1998 dibangun kembali menjadi menjadi dua tingkat namanya berubah menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Istimewa Aceh dan bangunan tersebut masih kokoh seperti sekarang, namun sudah banyak mengalami perbaikan dan renovasi. Pada tahun 2000 Kanwil Daerah Istimewa Aceh menjadi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

1. Visi

Terwujudnya Aceh sehat yang islami, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera.

2. Misi

- a. Peningkatan mutu pemberian jaminan kesehatan masyarakat
- b. Investasi sumber daya manusia sejak dini
- c. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, merata dan terjangkau
- e. Penyelenggaraan manajemen kesehatan yang baik.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

Dinas kesehatan Provinsi Aceh mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dibidang pengendalian dan penanggulangan penyakit pembinaan

pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan dan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Serketaris

Merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan, keuangan, dan umum mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan dengan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, dan PHLN.
- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajiandan oengembangan program kesehatan.
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan program kesehata.

2. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Merupakn unsur pelaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan dasar, rujukan kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pembinaan pelayanan kesehatan dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang kefarmasian, bantuan kesehatan, pengembangan profesi kesehtan, registrasi dan akreditasi. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, bantuan kesehatan, pengembangan profesi, pendidikan tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi. Untuk melaksanakan tugas, bidang pengembangan sumber daya kesehatan dan kefarmasian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kefarmasiaan, alat kesehatan dan bantuan kesehatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian profesi dan uji kompetensi tenaga kesehatan.

- c. Pelaksanaan kegiatan registrasi, akreditasi, perizinan, sertifikasi sarana dan prasarana serta kalibrasi alat kesehatan.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pengembangan suber daya kesehatan dan kefarmasian.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kapala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Kesehatan Masyarakat.
- Merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang kesehatan ibu dan anak gizi masyarakat dan konseling trauma mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan umum upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan instasni dan atau lembaga terkait lainnya dibidang oembinaan kesehatan masyarakat dan
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oelh kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. UPTD Laboraturium Kesehatan
- Mempunyai tugas melaksanakan sebgian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemeriksaan laboraturium, pengembangan program laboraturium kesehatan, pembinaan teknis pemeriksaan laboraturium kesehatan lainnya, membimbing tenaga teknis di bidang laboraturium kesehatan dengan tugas :
- a. Melaksanaka pelayanan laboraturium klinik dan laboraturium kesehatan masayrakat dan sebagai laboraturium rujukan tingkat provinsi.
 - b. Melakukan pemeriksaan secara laboraturium semua spsimen sampel yang dirujuk ke laboraturium
 - c. Melaksanakan pembinaan/ bimbingan dibidang teknik laboraturium terhadap laboraturium yang kurang mampu baik pemerintah maupun swasta.

4.2 Hasil Penelitian

1. Rasio Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati pasar. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) yang maksimal. Perhitungan digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen ekonomis, maka disajikan deskripsi data dari program yang terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh periode tahun 2018-2020 pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rasio Ekonomis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020

Tahun	Rasio Ekonomis (%)			Persentase
	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Sisa Anggaran	
2018	1,151,050,258,612	1,040,949,527,417	110,100,731,195	90,43
2019	1,029,048,085,096	1,171,177,003,665	-142,128,9118,569	113,81
2020	1,189,706,141,947	1,091,003,534,466	98,702,607,481	91,70

Sumber : Data Diolah 2022

Ekonomis anggaran tahun 2018:

$$2018 = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

$$2018 = \frac{\text{Rp. 1,040,949,527,417}}{\text{Rp. 1,151,050,258,612}} \times 100\%$$

$$= 90.43\%$$

Pada tahun 2018 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp. 1,151,050,258,612 dan realisasi anggaran belanja Rp. 1,040,949,527,417 hal ini menunjukkan rasio ekonomis sebesar 90.43%. Rasio ekonomis antara 90%-100% dapat dikatakan ekonomis. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang sangat ekonomis.

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{\text{Rp } 1,171,177,003,665}{\text{Rp } 1,029,048,085,096} \times 100\% \\ &= 113,81\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp. 1,029,048,085,096 dan realisasi anggaran belanja Rp. 1,171,177,003,665 hal ini menunjukkan rasio ekonomis sebesar 113,81%. Rasio ekonomis antara 90%-100% dapat dikatakan tidak ekonomis. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang sangat tidak ekonomis.

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{\text{Rp } 1,091,003,534,466}{\text{Rp } 1,189,706,141,947} \times 100\% \\ &= 91,70\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Rp. 1,189,706,141,947 dan realisasi anggaran belanja Rp1,091,003,534,466 hal ini menunjukkan rasio ekonomis sebesar 91.70%. Rasio ekonomis antara 90%

- 100% dapat dikatakan ekonomis. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang ekonomis.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* (keluaran) yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan, maka semakin rendah efisiensi suatu organisasi maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efisien.

Data *input* dan *output* dalam penelitian ini diperoleh dari data pencapaian Realisasi Keuangan yang terdapat di LAKIP Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh.

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen efisiensi, maka disajikan deskripsi data dari program yang terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh periode tahun 2018-2020 pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020

Tahun	Rasio Ekonomis (%)			Persentase
	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Sisa Anggaran	
2018	1,151,050,258,612	1,040,949,527,417	110,100,731,195	90,43
2019	1,029,048,085,096	1,171,177,003,665	-142,128,9118,569	113,81
2020	1,189,706,141,947	1,091,003,534,466	98,702,607,481	91,70

Sumber : Data Diolah 2022

Efisiensi anggaran tahun 2018:

$$2018 = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

$$2018 = \frac{\text{Rp. 1,040,949,527,417}}{\text{Rp. 1,151,050,258,612}} \times 100\%$$

$$= 90.43\%$$

Pada tahun 2018 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp. 1,151,050,258,612 dan realisasi anggaran belanja Rp. 1,040,949,527,417 hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 90.43%. Rasio ekonomis antara 90%-100% dapat tidak efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang tidak efisien.

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{\text{Rp } 1,171,177,003,665}{\text{Rp } 1,029,048,085,096} \times 100\% \\ &= 113,81\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp. 1,029,048,085,096 dan realisasi anggaran belanja Rp. 1,171,177,003,665 hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 113,81%. Rasio efisiensi antara 90%-100% dapat dikatakan tidak efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang tidak efisien.

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{\text{Rp } 1,091,003,534,466}{\text{Rp } 1,189,706,141,947} \times 100\% \\ &= 91,70\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Rp. 1,189,706,141,947 dan realisasi anggaran belanja Rp1,091,003,534,466 hal ini menunjukkan rasio efisiensi sebesar 91.70%. Rasio ekonomis antara 90% - 100% dapat dikatakan tidak efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang tidak efisien.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/ program dikatakan lebih efektif

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen efektivitas, maka disajikan deskripsi data dari program yang terdapat pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh periode tahun 2018-2020 pada tabel 4.1

Tabel 4.3
Rasio Efektivitas Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020

Tahun	Rasio Efektivitas (%)			Persentase
	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Sisa Anggaran	
2018	1,151,050,258,612	1,040,949,527,417	110,100,731,195	90,43
2019	1,029,048,085,096	1,171,177,003,665	-142,128,9118,569	113,81
2020	1,189,706,141,947	1,091,003,534,466	98,702,607,481	91,70

Sumber : Data Diolah 2022

Efektivitas anggaran tahun 2018:

$$2018 = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{\text{Rp. 1,040,949,527,417}}{\text{Rp. 1,151,050,258,612}} \times 100\% \\
 &= 90.43\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp. 1,151,050,258,612 dan realisasi anggaran belanja Rp.

1,040,949,527,417 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 90.43%. Rasio fektivitas antara 90%-100% dapat sangat efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang sangat baik.

$$\begin{aligned}
 2019 &= \frac{\text{Rp } 1,171,177,003,665}{\text{Rp } 1,029,048,085,096} \times 100\% \\
 &= 113,81\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp. 1,029,048,085,096 dan realisasi anggaran belanja Rp. 1,171,177,003,665 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 113,81%. Rasio efektivitas antara 90%-100% dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang sangat baik.

$$\begin{aligned}
 2020 &= \frac{\text{Rp } 1,091,003,534,466}{\text{Rp } 1,189,706,141,947} \times 100\% \\
 &= 91,70\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Rp. 1,189,706,141,947 dan realisasi anggaran belanja Rp1,091,003,534,466 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 91.70%. Rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan kinerja yang sangat efektif.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh periode tahun 2018-2020 menggunakan metode *value*

for money. Metode *value for money* ini terbagi menjadi tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, efektivitas. Berdasarkan hasil analisis data, maka hasil pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Pengukuran ekonomis bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh periode tahun 2018- 2020 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (*input*) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Keekonomisan suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, tetapi juga harus mempertimbangkan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Penghematan menjadi berkurang maknanya jika keluaran (*output*) yang dihasilkan tidak sesuai target atau tidak dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil analisis data atas pengukuran rasio ekonomis terhadap program kerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dapat diketahui bahwa telah memenuhi elemen ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang disediakan tiap tahunnya, tidak habis terpakai dalam memenuhi seluruh program kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2018 persentase rasio ekonomis sebesar 94,43% berada di kategori tidak ekonomis. Pada tahun 2019 persentase rasio ekonomis sebesar 113,81% berada di kategori tidak ekonomis. Pada tahun 2020 persentase rasio ekonomis sebesar 91,70% berada di ekonomis.

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (Input) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati pasar (Mardiasmo, 2016:145)

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh SUlastiningsih (2015) dengan judul” Pengukuran Kinerja Berbasis Value For Money Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19% kinerja keuangan berada pada kriteria kurangekonomis. Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dalam menggunakan sumber daya (*input*) yang tersedia untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa pelayanan dibidang kesehatan.berdasarkan hasil analisis data pengukuran rasio efisiensi pada program kerja periode taun 2018-2020 diketahui bahwa untuk periode tahun 2018 dapat dikatakan tidak efisien.

Dinas kesehatan Provinsi Aceh tidak dapat meminimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam hal ini yang digunakan keluaran (*output*) tiap program kerja mancapai 100%. Mengetahui perbandingan tingkat efisiensi dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) pada Dinas Kesehatan Aceh dapat dianalisis bahwa, selama kurun waktu 3 tahun, realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan target anggaran belannja hasil nya tidak efisien.

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *output* yang maksimum input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu.

Semakin besar rasio tersebut maka semakin tidak efisien suatu organisasi (indra Bastian, 2014:289). Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) dengan judul penelitian “Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir. Sejalan dengan hasil penelitian ini.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Kecuali pada tahun 2011. Rasio efektifitas tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara tidak efektif karena hasil rasionya kurang pada bagian SIM secara umum tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%.

3. Rasio Efektivitas

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dalam mencapai tujuan atau target kebijakan dari suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian dari pengukuran efektivitas berdasarkan program kerja yang diteliti.

Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, sewaktu-waktu mengalami penurunan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telahmencapai rencana yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan akibat dari keluaran (*output*) yaitu dalam pencapaian atau terlaksananya suatu program. Semakin besar *output* yang dihasilkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pada

Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tingkat efektivitas pada tahun 2018 dan 2020 sangat efektif tetapi pada tahun 2019 tidak efektif di karenakan jumlah realisasi anggaran lebih tinggi dari pada anggaran yang diberikan.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2016:155)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010- 2013, menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif.

4.4 Analisis Value For Money

Berdasarkan pembahasan mengenai pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pada Dinas Kesehatan Aceh periode tahun 2018-2020, maka dapat dibuat tabel rasio secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rasio Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas
Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2020

Tahun	Rasio (%)		
	Ekonomis	Efektivitas	Efisiensi
2018	90.43	113.81	91.70
2019	90.43	113.81	91.70
2020	90.43	113.81	91.70

Sumber: data diolah, 2022

Dari tabel 4.4 diatas diketahui bahwa kinerja program Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tahun 2018-2020 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat value for money yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Hal ini dapat ditunjukkan oleh rata-rata rasio efisiensi dan efektivitas yang diperoleh, yang mencapai angka 90%-100% dimana hal ini tidak efisien dalam mengelola anggaran yang dialokasikan dan efektivitas program kerja yang dimiliki telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan dan dimbangi dengan terjadinya penghematan anggaran di setiap tahunnya (ekonomis).

Value for money adalah konsep dalam organisasi sector public yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai utang. Pengukuran kinerja Value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan program dan organisasi (Mardiasmo, 2015:165).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) dengan judul penelitian “Penerapan Konsep Value for money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Polres Ogan Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan

dengan realisasi pendapatannya. Kecuali, pada tahun 2011. Rasio efektivitas tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio ekonomis Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tergolong ekonomis, pada tahun 2018 jumlah persentase rasio sebesar 90,43% dan tergolong ekonomis. Pada tahun 2019 jumlah persentase rasio sebesar 113.81% dan termasuk ke dalam kategori tidak ekonomis. Dan tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 91.70%, dimana jumlah persentasenya berada di kategori ekonomis.
2. Rasio efektivitas Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tergolong sangat efektif, pada tahun 2018 jumlah persentase rasio sebesar 90.43% dan tergolong sangat efektif. Pada tahun 2019 jumlah persentase rasio sebesar 113.81% dan termasuk ke kategori sangat efektif. Dan tahun 220 rasio efektivitas sebesar 91.70% dimana jumlah persentasenya berada dikategori sangat efektif
3. Rasio efisiensi Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tergolong tidak efisien pada tahun 2018 jumlah persentase rasio sebesar 90.43% dan tergolong tidak efisien. Pada tahun 2019 jumlah efisien rasio sebesar 113.81% dan termasuk ke dalam kategori tidak efisien. Dan tahun 2020 rasio efisiensi

sebesar 91.70% dimana jumlah persentasenya berada di kaegori tidak efisien.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk kebaikan dan kemajuan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Banda Aceh, Yaitu:

1. Hendaknya Dinas Kesehatan Provinsi Aceh melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dari segi ekonomis dapat mempertahankan kinerjanya dari tahun ke tahun berikutnya.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh diharapkan dapat menghasilkan output yang lebih baik. Penggunaan anggaran yang tidak melebihi dari yang telah ditetapkan bukan merupakan satu-satunya patokan penilaian kinerja melainkan harus dibandingkan dengan *output* yang telah dihasilkan.
3. Mengingat pentingnya suatu ekonomi, efisiensi ,efektivitas dalam sebuah perusahaan, maka sebaiknya anggaran dan program disusun secara teliti dan sebaiknya dilakukan secara seksama sehingga benar-benar menjadi pedoman kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah* Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Bastian Indra. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. BPFE. Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Dwi. 2019. *Teori Akuntansi* , Erlangga, Jakarta. Hal 154
- Fahmi, Irham. 2012. “*Analisis Kinerja Keuangan*” , Bandung: Alfabeta.
- Halim. 2017. *Dasar-dasar manajemen Keuangan*. UMM Press, Malang.
- Hanafi, Mahmud M. 2010. *Manajemen Keuangan*. Cetakan kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Hery. 2015. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta. Hal 45
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke -12. Yogyakarta.
- Jumingan. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV*. BPFE: Yogyakarta.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.